



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/Kep.891-Hukham/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat di tahun 2026, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

C9A42D1EE2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



C9A42D1EE2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.54/Kep.891-Hukham/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2026

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
2.	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
3.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Provinsi Jawa Barat	
4.	Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
5.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
6.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	
7.	Pedoman Penyusunan Rencana Pelayanan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan	
8.	Penyelenggaraan Kemitraan Kepemudaan	
9.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa	
10.	Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Manajer Bagi Putra Daerah Di Provinsi Jawa Barat	
11.	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	
12.	Beasiswa Pendidikan	



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
13.	Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	
14.	Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pornografi	
15.	Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
16.	Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	
17.	Pendidikan Karakter Gapura Pancawaluya Jawa Barat Istimewa	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
18.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	
19.	Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
20.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
21.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
22.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
23.	Tata Cara Usulan, Penilaian, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
24.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah	
25.	Pedoman Kerja Sama dan Pembentukan Unit Usaha pada Badan Layanan Umum Daerah	
26.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat	
27.	Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
28.	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
29.	Pusat Kesejahteraan Sosial/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat	



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
30.	Pengelolaan Barang Persediaan untuk Penanganan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
31.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	
32.	Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat	
33.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
34.	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah	
35.	Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2027-2032	
36.	Penugasan Badan Usaha Milik Daerah PT Agronesia Jabar dalam Pengelolaan Tambak Garam di Jawa Barat	
37.	Penyelenggaraan Penanganan Infrastruktur dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
38.	Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat	
39.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
40.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Bara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Susun Sederhana	
41.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
42.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
43.	Pengawasan dan Pengendalian Penerapan Tarif Penyedia Layanan Angkutan yang Bermitra dengan Penyedia Layanan Aplikasi	
44.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Umum dalam Wilayah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat	
45.	Pemberdayaan Penyuluh Swadaya, Fasilitator Daerah, dan Tenaga Kerja Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
46.	Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
47.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
48.	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan	



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
49.	Tata Cara Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah	
50.	Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan	
51.	Fasilitasi Asuransi Pertanian	
52.	Kemitraan Pengelolaan Lahan antara Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Petani Penggarap	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
53.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
54.	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
55.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah	
56.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
57.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
58.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
59.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
60.	Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
61.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
62.	Masyarakat Hukum Adat	
63.	Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen di Jawa Barat	
64.	Rencana Umum Penanaman Modal	



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
65.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
66.	Pengembangan Peternakan di Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Asisten Administrasi Umum		
67.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
68.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
69.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
70.	Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Barat	
71.	Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
72.	Pengelolaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
73.	Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
74.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	
75.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	
76.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
77.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
78.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	
79.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
80.	Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
81.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
82.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	
83.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
84.	Perubahan Formulasi Bobot Penilaian Kinerja Jabatan Guru pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	
85.	Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi pada Jawa Barat <i>Corporate University</i>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
86.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
87.	Penilaian Barang Milik Daerah	
88.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
89.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
90.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
91.	Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
92.	Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
93.	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
94.	Perubahan Pergub Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
95.	Pergub tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2026	
96.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Tata Cara Pelaksanaannya dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



C9A42D1EE2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C9A42D1EE2>